

PERANAN SYAMSU BAHRUN DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA DI PROVINSI JAMBI 1945-1949

Devina Intan,*Ujang Hariadi**

Alumni Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Unbari
Dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Unbari

Abstrak

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Sukarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia. Maka, sejak saat itu Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Namun, kemerdekaan Indonesia tidak diakui oleh Belanda yang menganggapnya sebagai suatu pemberontakan. Bangsa Indonesia yang telah merasakan penderitaan dan penyiksaan oleh para penjajah tidak ingin terulang kembali. Semangat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dilakukan diberbagai daerah termasuk oleh rakyat Jambi yang juga tampil kedepan untuk turut andi mengambil bagian dengan aktif melakukan perlawanan terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh penjajah. Salah satu sosok pejuang yang berpengaruh di daerah Jambi adalah Syamsu Bahrnun, pejuang yang berasal dari daerah Sarolangun. Dilahirkan tahun 1905 di Desa Pangidaran, Kecamatan pauh, Kabupaten Sarolangun. Syamsu Bahrnun merupakan sosok yang mampu memberi semangat dalam mempertahankan kemerdekaan. Syamsu Bahrnun merupakan pejuang yang teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa diatas kepentingan pribadinya. Tujuan Syamsu Bahrnun, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. Syamsu Bahrnun merupakan seorang yang tegas, ia adalah sosok pejuang kemerdekaan yang sangat cinta terhadap Daerah Jambi.

Kata Kunci : perann, Syamsul Bahrnun.

Abstract

The proclamation of Indonesian independence on August 17, 1945 by Sukarno-Hatta on behalf of the Indonesian people. So, since then Indonesia has become an independent and sovereign country. However, Indonesia's independence was not recognized by the Dutch who considered it a rebellion. The Indonesian people who have felt the suffering and torture by the colonizers do not want it to happen again. The spirit of the struggle to maintain independence was carried out in various regions, including by the people of Jambi who also came forward to participate and take part in actively fighting against the efforts made by the invaders. One of the influential figures in the Jambi area was Syamsu Bahrnun, a fighter from the Sarolangun area. Born in 1905 in Pangidaran Village, Pauh District, Sarolangun Regency. Syamsu Bahrnun is a figure who is able to give encouragement in defending independence. Syamsu Bahrnun is a fighter who is steadfast in principles and beliefs, always putting the interests of the community and nation above his personal interests. Syamsu Bahrnun's goal is to realize Indonesia as a sovereign and independent nation. Syamsu Bahrnun is a firm person, he is a figure of a freedom fighter who really loves the Jambi Region.

Keywords: role, Syamsul Bahrnun

A. PENDAHULUAN

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Sukarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia, sejak saat itu Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari perjuangan rakyat Indonesia yang sangat dinantikan

sejak dahulu. Kemerdekaan Indonesia menjadi sebuah negara, tetapi tidak diakui oleh Belanda. Proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi Belanda merupakan suatu pemberontakan. Sikap Belanda tersebut dikarenakan kemerdekaan Indonesia hanya sebuah gerakan yang dibuat oleh para pemimpin

Indonesia yang bekerjasama dengan Jepang. Sehingga bagi Belanda, kemerdekaan Indonesia belum sepenuhnya mendapat dukungan dari rakyat Indonesia dan kedaulatan Indonesia masih berada di tangan Belanda (Agus Susilo. 2018).

Bangsa Indonesia yang telah merasakan penderitaan dan penyiksaan dari kaum penjajah tidak ingin lagi memberi peluang kepada penjajah untuk menguasai Indonesia. Pernyataan ini dibuktikan rakyat Indonesia yang sadar akan kebebasan hak dan kemerdekaan tanah air bangkit mengangkat senjata menentang kaum imperialisme Belanda (Darwis. 2017). Semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan rakyat Jambi, sebagaimana di daerah-daerah lain di Indonesia rakyat Jambi tampil kedepan untuk turut mengambil bagian dengan aktif melakukan perlawanan terhadap usaha-usaha penjajah yang mencoba mengembalikan jajahannya di Indonesia ini, sesuai dengan kemampuan dan cara berjuang pada waktu itu.

Salah satu sosok pejuang yang berpengaruh di daerah Jambi adalah Syamsu Bahrun, pejuang yang berasal dari daerah Sarolangun. Dilahirkan tahun 1905 di Desa Pangidaran, Kecamatan pauh, Kabupaten Sarolangun (Wawancara: Hamidsyam. 1 September 2021). Syamsu Bahrun merupakan sosok yang mampu memberi semangat dalam mempertahankan kemerdekaan. Syamsu Bahrun merupakan pejuang yang teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa diatas

kepentingan pribadinya. Tujuan Syamsu Bahrun, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. Syamsu Bahrun merupakan seorang yang tegas, ia adalah sosok pejuang kemerdekaan yang sangat cinta terhadap Daerah Jambi (Wawancara: Iskandar. 2 Agustus 2021).

Syamsu Bahrun pada usia muda sudah menjadi pegawai staf pemerintahan Belanda, pada usia 16 tahun pernah berkerja menjadi serketaris Demang di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun. Pada usia 18 tahun Syamsu Bahrun dipindahkan tugas di Sungai Manau Kabupaten Merangin, dan selanjutnya dipindahkan ke Tebo (Wawancara; Hamidsyam. 1 September 2021).

Pada tanggal 2 September 1945 dibentuklah KNI (Komite Nasional Indonesia) daerah Jambi. Pada awal November 1945 dipilihlah pengurus KNI cabang Sarolangun, Syamsu Bahrun sebagai ketua dan Ahmad Syarnubi sebagai wakil ketua (Depdikbud. 1986:98). Setelah terbentuknya KNI Maka KNI lah yang bertanggung jawab mengorganisir perjuangan serta menampung dan mengurus bekas *haiho giugun, kinderhosi* (Orang kerja paksa Jepang). Pada masa kemerdekaan daerah Jambi tidak mempunyai modal persiapan untuk melawan Belanda, tetapi semangat untuk mempertahankan kemerdekaan tetap bergelora. Maka dari itulah para rakyat dengan sukarela membantu dengan berupa uang, pakaian dan lain-lain. Para pemuda merampas senjata-senjata milik tentara Jepang dan diserahkan untuk perjuangan (Bahrun. 1983:3-4).

Pada 28 sampai 31 Mei 1946 di Kota Jambi diadakan musyawarah KNI seditaerah Jambi yang dihadiri oleh utusan-utusan dari kewedanaan. Musyawarah ini bertujuan untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan. Sebanyak 25 orang yang terdiri dari 8 orang diangkat langsung oleh Residen dan 17 orang melalui pemilihan (Lindayanti. 2014:98). Pada musyawarah ini terpilih Rd.Inu Kertopati sebagai ketua dan Syamsu Bahrhun sebagai wakil ketua. Untuk membiayai perjuangan yang setiap hari memuncak, maka daerah Jambi membat peraturan pemungutan 10% dari hasil bumi terutama karet yang akan dikirim ke Singapura. Hasil pungutan ini dipergunakan untuk melengkapi alat-alat kepentingan perjuangan seperti senjata-senjata untuk pertahanan dan lain-lain kepentingan pemerintah sipil yang dapat ditukar ke Singapura. Badan perjuangan di organisasikan begitu rupa semua potensi rakyat di mana saja berada dapat dimanfaatkan, sehingga perjuangan total dapat digerakkan dengan maksimal (Bahrhun. 1983:7-8).

Pada tanggal 2 April 1947 Syamsu Bahrhun diangkat menjadi Wedana Sarolangun dengan surat keputusan Gubernur Sumatera nomor 257. Raden Inu Kertopati sebagai ketua Badan Pekerja mengambil kebijakan memberi uang Rp.300.000 kepada setiap wedana Jambi guna persiapan perang melawan Belanda. Uang boleh digunakan apabila pemerintahan wedana mengungsi keluar kota karena diserang Belanda (Lindayanti. 2014:95).

Pada tahun 1949, Syamsu Bahrhun dan yang lainnya dipaksa

oleh Belanda untuk menjabat menjadi anggota Dewan Jambi Sementara (DDS) dan memilih Syamsu Bahrhun sebagai ketua dan Ibrahim sebagai wakil ketua. Tujuan dari pembentukan Dewan Djambi Sementara adalah agar daerah Jambi menjadi daerah istimewa yang diberikan surat oleh raja Belanda. surat itu diberikan kepada anggota DDS agar menandatangani bahwa daerah Jambi menjadi daerah istimewa dan supaya tentara federal bikinan Belanda diakui sebagai tentara daerah Jambi tetapi usulan itu tidak disetujui oleh anggota DDS (Lindayanti. 2014:12).

Seorang tokoh seperti halnya Syamsu Bahrhun, seharusnya mendapatkan perhatian atau tempat dalam penulisan khususnya penulisan sejarah tokoh yang dikenal dengan biografi. Biografi sangat menarik untuk dikaji sebab yang menjadi kajian itu sendiri adalah manusia sebagai permasalahannya. Biografi dapat mendekatkan gerak sejarah yang sebenarnya dan membuat kita lebih mengerti tentang pergumulan seseorang dengan zamannya yang dituntut oleh pandangan hidupnya maupun harapan masyarakat. Biografi dalam historiografi jarang sekali ditulis oleh sejarawan. sebagian besar yang menulis biografi adalah para jurnalis atau wartawan. Biografi dalam penulisan sejarah dapat memberikan sumbangan berupa psiko histori, yaitu sejarah kejiwaan tokoh-tokoh sejarah, khususnya para pelaku dan penyaksi. tokoh-tokoh yang layak ditulis riwayat hidup adalah orang-orang dalam sejarah yang sesuai kiprahnya baik itu tokoh politik, tokoh pendidikan, tokoh agama,

tokoh budaya, dan lain sebagainya (Priyadi, 2011:98).

Biografi sudah barang tentu merupakan Unit sejarah yang sejak zaman klasik telah ditulis antara lain oleh historiografi tacitus. sejak itu biografi termasuk bidang sejarah yang populer dan senantiasa sangat menarik serta banyak dibutuhkan. Dipandang dari teknik penulisan memang perlu diakui biografi menuntut kemahiran memakai bahasa dan retorik tertentu, pendeknya seni menulis. Biografi yang ditulis secara baik mampu membangkitkan inspirasi kepada para pembaca. jadi dipandang dari sudut ini biografi mempunyai fungsi penting dalam pendidikan (Kartodirdjo, 1992:76-77).

Sementara itu penulisan tentang biografi politik bukan hanya sekedar menulis catatan riwayat hidup seseorang saja tetapi juga menulis tentang bentuk penghargaan terhadap kehidupannya sehingga melalui penelitian ini seorang tokoh akan berinteraksi dengan generasi penerus. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik menulis tentang “Peranan Syamsu Bahrun Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di provinsi Jambi 1945-1949”. Biografi ini menarik untuk ditulis karena tentang perjuangan seseorang, peran Syamsu Bahrun yang sudah mengenyam suka duka dalam memperjuangkan hak kemerdekaan Indonesia di Provinsi Jambi.

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini maka permasalahan pokoknya adalah “membahas tentang perjuangan Syamsu Bahrun dalam mempertahankan kemerdekaan“

untuk lebih memfokuskan pada hasil penelitian, maka rumusan masalah yang diajukan yaitu faktor – faktor apa yang mempengaruhi peran Syamsu Bahrun dalam mempertahankan kemerdekaan, dan bagaimana peran Syamsu Bahrun dalam mempertahankan kemerdekaan di Jambi.

Untuk ruang lingkup temporal penelitian ini adalah meliputi tahun 1945 sampai 1949, penulis mengambil batasan awal 1945, karena pada tahun tersebut diumumkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan batasan akhirnya adalah pada tahun 1949, pemerintah Republik Indonesia yang ada di kota Jambi menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda. Sedangkan untuk ruang lingkup spasial adalah daerah Provisnsi Jambi dikarenakan daerah ini merupakan tempat dimana Syamsu Bahrun tinggal dan daerah tersebut adalah daerah yang diperjuangkan kemerdekaannya.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yaitu seperangkat prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan menyajikannya sistematis dari hasil keseluruhan prosedur yang dicapai melalui beberapa tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Kuntiwidjoyo, 2001:63).

Langkah awal dalam penelitian ini yaitu melakukan kegiatan heuristik, metode heuristik adalah peneliti menggunakan teknik wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan sumber. Sumber

primer yang digunakan arsip yang berasal dari museum perjuangan, yaitu catatan pribadi yang ditulis oleh Syamsu Bahrun mengenai perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan, selain itu data primer didapat dari laporan-laporan pemerintahan tentang Syamsu Bahrun. Informasi lainnya didapat dari hasil wawancara yang diperoleh dari keturunan Syamsu Bahrun yang mengetahui persis perjuangan dari Syamsu Bahrun, selain dari keturunan data didapatkan dari tetangga maupun saudara yang mengetahui persis kehidupan Syamsu Bahrun. Sedangkan sumber sekunder melakukan studi literatur yaitu mengumpulkan data dan dengan mencari referensi tertulis mulai dari buku, jurnal, skripsi yang terkait yang dilakukan melalui studi keperpustakaan prodi pendidikan sejarah FKIP, perpustakaan FKIP Universitas Batanghari. Peroleh informasi pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan media internet sebagai sumber literatur tambahan nantinya.

Kedua, Kritik sumber adalah menilai sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan dalam penulisan sejarah baik kritik eksteren maupun kritik interen. Kritik eksteren berkaitan dengan keaslian, keutuhan dan keotentikan sumber. Kritik eksteren dari segi dokumen melihat keaslian arsip sezaman yang digunakan dengan melakukan kritik dari segi fisik sumber, seperti melihat tanggal arsip dibuat, kertas yang digunakan, model tulisan, bahasa dan gaya penulisan. Sedangkan, dari segi sumber lisan melihat keaslian sumber dengan informan yang dekat

dengan pelaku sejarah akan lebih diutamakan. Agar informasi yang didapat tidak subjektif, maka penulis tidak hanya melakukan wawancara dengan satu keturunan saja, melainkan beberapa orang yang berhubungan dengan pelaku sejarah.

Kritik interen berkaitan dengan kebenaran sumber (kredibilitas). Pada tahap ini, dari segi dokumen mengacu pada kebenaran sumber dengan mengkritisi isi dari dokumen yang digunakan. Kemudian, penulis membandingkan sumber yang satu dengan sumber yang lain untuk mencari data yang lebih akurat yang berkaitan dengan tema penelitian. Penulis lebih mengutamakan arsip yang berkaitan dengan Syamsu Bahrun.

Ketiga, Interpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah. Interpretasi merupakan proses penggabungan atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan tema penelitian dan dengan sebuah kerangka konseptual kemudian disusunlah fakta tersebut ke dalam suatu interpretasi secara menyeluruh. Setelah data penelitian ini diperoleh dari pustaka dan wawancara maka dipergunakanlah kerangka konseptual biografi yang mengacu pada pendekatan masalah khusus atau kejadian luar biasa atau kejadian gawat yang menyangkut Syamsu Bahrun. Untuk melukiskan secara utuh dan kronologis jalannya perjuangan Syamsu Bahrun dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia khususnya Daerah Jambi 1945-1949.

Langka terakhir Historiografi adalah penulisan data-data yang telah melewati beberapa proses penyaringan hingga menjadi kesimpulan akhir yang relevan, sehingga data tersebut dapat ditulis dan dipaparkan sesuai dengan kerangka tulisan dalam bentuk penulisan sejarah. Penulisan sejarah ini meliputi pengantar, hasil penelitian, dan kesimpulan. Dalam setiap bagian diusahakan tersaji dengan tema yang sistematis dan kronologis dengan menggunakan pertanyaan kualitatif terhadap data-data yang telah didapat sebagai karakteristik dari karya sejarah yang membedakan dengan karya tulis lain.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Awal Karir Syamsu Bahrun Sebelum kemerdekaan

Struktur pemerintahan di negara jajahan menempatkan Gubernur Jenderal pada posisi yang sangat berkuasa atas segala sesuatu urusan di wilayah jajahan. Gubernur Jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh GubernurBadan Residen. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di Bukittinggi Sumatera Barat untuk wilayah provinsi Sumatera Tengah, sedangkan di tingkat kabupaten terdapat Asisten Residen dan Pengawas (*controleur*). Keberadaan Asisten Residen dan Pengawas diangkat oleh Gubernur Jenderal untuk membantu mengawasi Bupati dan Wedana dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Wewenang Bupati dalam memerintah daerahnya tidak otonom, melainkan telah dibatasi undang-undang dengan mendapat kontrol dari pengawas

yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Dibawah ini adalah struktur dari tingkatan yang paling atas sampai tingkatan paling bawah beserta jabatannya, berdasarkan Nur Laely (:2017:10) yakni:

1. Pejabat pemerintahan tertinggi dipegang oleh seorang gubernur jenderal
2. *Gewest* atau *Residentie* yang dijabat oleh seorang Residen.
3. *Afdeeling* dijabat oleh asisten residen.
4. *Onderafdeeling* serta *Gegenshap* dijabat oleh controlir dan bupati.
5. Distrik dijabat oleh seorang Wedana (Punggawa).
6. *Onderdistrik* dijabat oleh seorang Asisten Wedana (Asisten Demang, Camat, Manca).
7. Desa dijabat seorang Lurah.

Awal karir Syamsu Bahrun dimulai saat berusia 16 tahun yaitu awal menjabat menjadi Asisten Demang pada 5 September 1926 di Pauh Sarolangun, kalau sekarang disebut sekretaris camat (Wawancara: Hamidsyam. 22 Oktober 2021) . Bekerjanya Syamsu Bahrun di kantor milik pemerintah Belanda dikarenakan faktor pendidikan SyamsuBahrun yang bisa berbahasa Belanda, menulis, dan berhitung setelah SyamsuBahrun mengenyam pendidikan di sekolah HIS, walaupun tidak sampai tamat yaitu hanya sampai kelas 5 (Bahrun. 1983:1). Asisten Demang jabatannya di bawah Demang di sebuah daerah. Tugas Asisten Demang yaitu membantu Demang dalam menjalankan tugasnya, perannya seperti membuat surat, meneken, dan lain-lain. Pada saat itu alat yang digunakan untuk menulis surat yaitu mesin ketik. Berbeda dengan zaman

sekarang yang menetik menggunakan laptop ataupun komputer, mesin ketik digunakan dengan sekali ketikan, dengan begitu huruf yang telah diketik tidak bisa dihapus dikarenakan saat menetik huruf langsung tercetak. Tugas Syamsu Bahrhun sebagai Asisten Demang mendapat gaji yang diberikan dari Residen Jambi dengan memberikan surat nomor 478 pada tanggal 30 Oktober 1929 dengan isi yaitu:

“Syamsul Bahrhun bin Bontet Assisten penulis di Asisten Demang di Pauh (bagian Sarolangun) segera memerintahkan untuk menikmati upah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan keputusan ini, o.s. sampai 1 Januari 1929 ditetapkan pada 2 tahun 3 bulan” (Arsip Residen Jambi. 30 Desember 1929).

Setelah 2 tahun bekerja sebagai Asisten Demang di kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, Syamsu Bahrhun dipindahkan di Sungai Manau pada usia 18 tahun pada 30 April 1930 dengan jabatan yang sama. Setelah bekerja di Sungai Manau, selanjutnya Syamsu Bahrhun dipindahkan di Muara Tebo pada 30 Desember 1930 dengan gaji tetap yaitu 20 gulden. Pindahan tugas menjadi Asisten Demang di Muara Tebo mendapat Surat Keputusan dari Residen Jambi yang diberikan pada tanggal 4 Desember 1930 dengan nomor 432 yang bersisi:

“Mengangkat sebagai juru tulis pada bupati di Muara Tebo, dengan bupati di Muara Tebo, dengan alokasi remunerasi setelah namanya dicantumkan dalam

negara pengambilan keputusan yang menyertainya, Syamsu Bahrhun bin Bontet Penulis di asisten demang di Sungai Manau dari departemen Bangko” (Arsip Residen Jambi. 4 Desember 1930).

Syamsu Bahrhun membantu demang dalam menjalankan jawabantannya di bawah pimpinan Belanda yang juga dipercaya untuk mengawasi hubungan penjualan garam di Muara Tebo. Penjualan garam di Muara Tebo yang tertulis dalam keputusan dari Residen Jambi pada tanggal 31 Januari 1931 dengan gaji 15 gulden yang isinya:

“Telah memutuskan : sebagai dari tangan, menitipkan pengawasan penjualan garam di Muara Tebo dengan tunjangan /15, (15 gulden) per bulan (Arsip Residen Jambi. 31 Januari 1931).

Pada tanggal 3 Agustus 1932, Syamsu Bahrhun dibebaskan dari pengawasan penjualan garam di Muara Tebo. Selanjutnya semua laporan diberikan kepada pengawas yang baru. Pembebasan penugasan tersebut diberikan keputusan oleh Residen Jambi, dengan diberikan surat keputusan dari Residen Jambi pada 19 Agustus 1932 No 310 dengan isi:

“Dibebaskan dari pengawasan kedudukan penjualan garam di Muara Tebo, terhitung mulai tanggal 3 Agustus 1932, Syamsu Bahrhun bin Bontet” (Arsip Residen Jambi. 9 Agustus 1932).

Pada tanggal 30 Juli 1932, Syamsu Bahrhun diangkat menjadi Asisten Demang di Keresidenan Jambi. Diangkatnya menjadi asisten demang Keresidenan Jambi membuat kenaikan gaji sebesar 25 gulden. Syamsu Bahrhun mengajukan

pemberhentian dari posisi Asisten Demang kepada Residen Jambi. Pengunduran diri Syamsu Bahrin disetujui oleh Residen Jambi. Keresidenan Jambi memberikan Surat Keputusan pemberhentian dan pemberian gaji Pada tanggal 17 Februari 1934 nomor 61 dengan isi :

“Telah membayar : berlaku sejak akhir maret 1934 atas permintaan untuk meninggalkan posisinya SyamsuBahrin bin Bontet di kantor lokasi Jambi tambahan dengan ini diberikan kepada pihak yang berkepentingan untuk informasi dan koreksi “

Setahun pemberhentian sebagai Asisten Demang, Syamsu Bahrin diangkat untuk menjadi Pasirah di daerah Marga Simpang III kabupaten Sarolangun yang dipilih langsung oleh penduduk setempat dan disahkan oleh residen Jambi. Kepribadian Syamsu Bahrin yang berwibawa sebagai seorang pemimpin itulah yang membuat Syamsu Bahrin dipilih oleh masyarakat setempat. Pengangkatan Syamsu Bahrin sebagai Pasirah di daerah Marga Simpang III yang diberikan surat keputusan oleh Residen Jambi pada 21 Mei 1935 dengan isinya yaitu:

“Syamsu Bahrin bin Bontet dipilih oleh penduduk untuk Pasirah bagian Marga Simpang III telah dikukuhkan dalam hubungan itu oleh yang bertanda tangan dibawah ini dan dianugerahi gelar pemanggung hakim rajotiang mengatakan adalah sah untuk mengakui dia seperti itu dan ketika menjadi perlu untuk mengulurkan tangan untuk membantu dalam pelaksanaan pelayanan”

Pengalaman Syamsu Bahrin dalam berkerja sebagai asisten demang dan pasirah membuatnya mengetahui bagaimana Belanda menjalankan pemerintahan di daerah Jambi. Ia menginginkan agar Indonesia merdeka.

2. Peran Syamsu Bahrin setelah kemerdekaan Indonesia

Kekalahan Jepang dari sekutu pada waktu perang dunia II tidak segera diketahui umum berkat sensor yang ketat namun para pemuda akhirnya mengetahuinya. Setelah mengadakan perundingan dengan para pemimpin termasuk Sukarno Hatta baik di Jakarta maupun di Rengas Dengklok, maka diputuskan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia secara sepihak. Maka hari jum'at tanggal 17 Agustus 1945 Jam 10.30 diumumkan kemerdekaan Indonesia yang ditandatangani oleh Sukarno Hatta atas nama Bangsa Indonesia (Depdikbud. 1986:45).

Proklamasi kemerdekaan di sambut dengan sangat bahagia oleh masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia sudah merasa lelah dengan lamanya penjajah ada di Indonesia. Usaha menyambut kemerdekaan ini disambut dengan cara tersendiri berbagai daerah Indonesia, Jawa mempunyai cara tersendiri, Sumatera mempunyai cara sendiri begitupun dengan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan daerah Indonesia lainnya (Yasin. 2020:230).

Menurut proklamasi 17 Agustus 1945 tersebut, daerah Jambi termasuk dalam Wilayah Republik Indonesia. Adapun berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diterima di daerah Jambi pada tanggal 18 Agustus 1945. Berita proklamasi

kemerdekaan disampaikan, dr.A.K Gani dari Palembang melalui telepon bahwa Indonesia telah merdeka. Berita Proklamasi Kemerdekaan tersebut diterima oleh R.Sudarsono, pimpinan buruh di pertambangan minyak Jambi.

Berita Jepang menyerah dan Indonesia telah merdeka akhirnya diketahui oleh tokoh-tokoh Jambi antara lain Abdullah Kartawira (Jambi), A. Thalib (Sungai Penuh), M. Kasim, Tukiran, Dulljali (Kuala Tungkal). Berita ini didapatkan dari orang Jambi yang bekerja di Penerangan (Hodokan) yaitu A. Kartawira.

Beberapa hari setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dilakukan maka rakyat di daerah Sarolangun, Bangko, Bungo, Tebo, Batanghari, Tungkal dan Kerinci sudah mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Setelah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia didengar oleh rakyat di daerah Jambi, maka sang merah putih mulai dikibarkan walaupun mendapat tantangan keras dari pihak pemerintahan Jepang. Pada tanggal 22 Agustus 1945, walaupun ada larangan dan penjagaan tentara Jepang, para pemuda antara lain R. Husin Akip dan Amin Aini berhasil mengibarkan bendera merah putih di puncak menara air di kota Jambi (Depdikbud. 1986:45-46).

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak diakui oleh Belanda, Sikap Belanda tersebut dikarenakan kemerdekaan Indonesia hanya sebuah gerakan yang dibuat oleh pimpinan Indonesia yang bekerjasama dengan Jepang. Belanda membonceng NICA dan sekutu untuk kembali lagi ke Indonesia dan

berkuasa kembali. Perlawanan terjadi diberbagai daerah dalam menghadapi Belanda yang ingin kembali.

Pada akhir Agustus 1945, Abunjani datang ke kediaman Syamsu Bahrun yang ada di daerah Pauh Sarolangun dengan membawa surat pemberitahuan dari A. Kartawirana yang berisi:

“Indonesia sudah merdeka yang diproklamasikan oleh Soekarno Hatta kemungkinan penjajah akan datang mengambil kembali Negara ini oleh sebab itu marilah kita mempertahankan dengan hati dan jiwa raga kita. Barang siapa yang setuju untuk berjuang mempertahankan mati-matian Republik Indonesia. Yang sudah diproklamasikan itu harap menandatangani surat ini. Barangsiapa yang tidak setuju, tidak usah ditandatangani” (Bahrun. 1983:3).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, disusul dengan telegram dari pemerintah pusat tanggal 23 Agustus 1945 dimana untuk setiap keresidenan diangkat seorang residen dan dibentuk Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada 25 Agustus 1945 Angkatan Pemuda Indonesia (API) Kresidenan Jambi mengadakan rapat yang ada di rumah Asmara Siagian, anggota polisi Republik Indonesia kota Jambi. Keputusan rapat tersebut berdasarkan Dewan Harian Angkatan 45 (1990:19) adalah sebagai berikut:

Ketua : Dr.Sagaf Yahya
Ketua Muda : M.Kamil
Penulis : R.Sucipto

Pembantu : Subari Ilyas

Setelah itu diadakan pertemuan oleh tokoh masyarakat terbentuk KNI daerah Jambi pada tanggal 2 September 1945. KNI Kawedanan. Susunan pengurus KNI daerah Jambi sebagai berikut:

Ketua : Makalam
Wakil Ketua : M.Chatab
Serkertaris : R.Abdllah Kartawira
Bendahara : Kemas A.Rivai
U. Pemuda : Abunjani
U. Keamanan : Tengku M.Isya
Ketua Muda : dr. Purwardi dan R.H.Sutopo

Dilengkapi dengan bagian Dewan Pengelolaan, Kemasyarakatan, Perekonomian, Pendermaan, Pemuda Republik Indonesia (PRI) dan bagian penjagaan keamanan rakyat Dewan Harian Angkatan 45 (1990:19-20).

Adapun KNI kawedanan yang terbentuk ketika itu antara lain ialah: KNI Muaro Bungo, KNI Muaro Tebo, KNI Sarolangun, dan KNI Bangko. Pada awal November 1945 KNI Kawedanan Sarolangun dipilih dengan pengurus (Arsip LVRI. 2014:27) yaitu:

1. Ketua : SyamsuBahrn
2. Wakil : A.Sjarnubi
3. Sekretaris : Teleng
4. Keuangan : Jusuf Nasri
5. Anggota : A.Butohid Aminudin Mahyuni

Pengurus terpilih mulai melaksanakan tugas terhitung dari bulan September 1945 sampai akhir jabatan pada bulan Februari 1946. Setelah terbentuknya KNI maka Syamsu Bahrn dan anggota lainnya bertanggung jawab untuk daerah Sarolangun mengorganisasikan perjuangan dan sebagai pimpinan

setempat serta menampung dan mengurus bekas Heiho, Gyugun, seinendan, bogodan, jeigendan dan badan keamanan lainnya (Bahrn. 1983). Badan-badan keamanan yang merasakan penderitaan rakyat akibat dari berbagai macam tindakan pihak Jepang berupa penindasan, perkosaan dan sebagainya, menjadi modal perlawanan terhadap Jepang dalam merebut kekuasaan daerah Jambi. Syamsu Bahrn sebagai ketua, memimpin perjuangan yang ada di Sarolangun, dan anggota lainnya yang mengatur strategi yang digunakan supaya Belanda tidak berkuasa di daerah Jambi khususnya daerah Sarolangun, dengan kecintaan terhadap tanah air yang ingin lepas dari belunggu Belanda dan semangat perjuangan yang tinggi.

Pada awal November 1945 diadakan sidang pertama KNI seluruh daerah Jambi, yang dihadiri oleh wakil-wakil tiap kawedanan serta pemerintah setempat. Rapat membahas beberapa segi persoalan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, serta siasat lainnya untuk mengatur perjuangan, dan mengatur pemerintahan. Sesudah kembali dari rapat, masing-masing kawedanan oleh KNI dan pemerintah setempat bertambah kesibukan untuk mengatur perjuangan dan membentuk badan-badan perjuangan setiap marga yaitu :

1. Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) Kresidenan Jambi dengan tugas menjaga keamanan dan ketertiban.
2. Membentuk Pemuda Republik Indonesia (PRI) dengan tugas menghimpun potensi yang ada di

masyarakat dan menggerakkan massa rakyat.

3. Mengusulkan kepada Gubernur RI wilayah Sumatera di Medan Mr. Tengku Moh. Hasan, Gubernur Sagaf Yahya diangkat menjadi Residen RI Keresidenan Jambi (Dewan Harian Angkatan 45. 1990)

Barisan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk pada tanggal 25 Agustus 1945, pada tanggal 5 Oktober 1945 nama BKR diganti dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada waktu BKR dibentuk telah pula dilakukan secara bertahap pemisahan tugas terhadap para pemuda. Sebagian pemuda yang pernah mendapat pendidikan atau latihan militer masuk BKR sedangkan selebihnya tinggal dalam Kesatuan Pemuda.

Pada awal Desember 1945 datang ke Sarolangun rombongan yang mengaku Panglima Agung Tentara Sumatera Selatan dipimpin oleh Emir Muhammad Nur. Rombongan ini mengadakan rapat umum dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia serta memberi semangat agar pemuda-pemuda segera memasuki tentara. Dari sinilah diatur oleh Emir Muhammad Nur untuk menggempur tentara Jepang yang masih ada di Lubuk Linggau.

Pada Februari 1946 di Sarolangun diadakan rapat yang terdiri dari berbagai perkawilan KNI yaitu:

1. KNI Muara Bungo diwakili oleh HB. Yahya
2. KNI Muara Tebo diwakili oleh dr.Syahriar, Rahman Salamuddin dan H. Nawawi

3. KNI Bangko diwakili oleh R.Sudaryo

4. KNI Sarolangun diwakili oleh Syamsu Bahrun, A. Syurnubi, Amiruddin dan Mahyuddin.

Rapat dipimpin oleh ketua KNI Sarolangun yakni Syamsu Bahrun. Agenda rapat membicarakan tentang kondisi daerah Jambi dan mendiskusikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Maka dengan itu mengutus Syamsu Bahrun dan A. Syurbani untuk pergi ke Jambi untuk menemui A. Kartawirana agar meningkatkan pelaksanaan teknis dari tindakan perlawanan. Tapi sayang rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sudah bocor (Bahrun. 1983).

Sehubungan dengan pertentangan yang terjadi tentang kepemimpinan di daerah Jambi, dan untuk tidak mergikan kesatuan dan persatuan di daerah Jambi, maka Komite Nasional Daerah Jambi menasehati Dr. Sagaf Yahya untuk mengundurkan diri. Dr. Sagaf Yahya mengajukan permohonan untuk melepaskan jabatan yang diajukan kepada Gubernur Sumatera dengan dilengkapi usul penggantinya.

KNI Keresidenan Jambi memberikan kriteria bahwa calon Residen hendaklah dapat mempunyai pengetahuan serta pengalaman dalam bidang pemerintahan. Pemilihan jatuh kepada Raden Inu Kertopati putra Sultan Thaha Syaifuddin. Usul pengunduran diri Dr. Sagaf Yahya dan usul pengangkatan Raden Inu Kertopati sebagai Residen Jambi dikirim kepada Gubernur Sumatera. Pelantikan Rn. Inu Kertopati ini dilakukan tidak lama setelah Komite Nasional Indonesia terbentuk Pada bulan November dilantik secara

resmi Raden Inu Kertopati sebagai Residen Jambi (Dewan Harian Angkatan 45. 1990). Provinsi Sumatera dengan Gubernur Mr. T. Mohammad Hassan. Daerah provinsi Sumatera meliputi 10 Keresidenan di Sumatera yaitu: Aceh, Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung.

Keresidenan Jambi pada masa revolusi kemerdekaan dibawah provinsi Sumatera yang berpusat di Medan terdiri dari beberapa Kewedanan yang meliputi:

- a. Kewedanan Jambi
- b. Kewedanan Muara Tembesi
- c. Kewedanan Sarolangun
- d. Kewedanan Bangko
- e. Kewedanan Muara Bungo
- f. Kewedanan Muara Tebo
- g. Kewedanan Jambi Luar Kota
- h. Kewedanan Kuala Tungkal

Pada tanggal 26 April 1946 di Bukittinggi diadakan sidang pertama KNI seluruh Sumatera. Utusan Keresidenan Jambi antara lain Syamsu Bahru, Dr. Sagaf Yahya, bd. Khattab dan wakil pemerintah Bupati Abd. Manan St. Saidi (Yasin. 2020:32). Sidang yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Mr. Tengku Muhammad Hassan, dengan pemantapan organisasi menghadapi Belanda, dalam sidang itu diputuskan pula untuk menghadapi perjuangan selanjutnya supaya lebih lancar maka Sumatera dapat dibagi menjadi 3 sub provinsi yaitu :

1. Sub Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli yang berkedudukan di Medan.
2. Sub Provinsi Sumatera Tengah yang terdiri dari keresidenan

Sumatera Barat, Riau dan Jambi, berkedudukan di Bukittinggi.

3. Sub Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari Keresidenan Palembang Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung, berkedudukan di Palembang.

Mengenai keputusan KNI ini ditolak oleh utusan Jambi. Para utusan Jambi menginginkan Keresidenan Jambi masuk ke sub. Provinsi Sumatera Selatan namun keinginan ini tidak dapat menjadi keputusan karena ketika mengambil voting, kalah dalam pengumpulan jumlah suara. Dalam sidang ini ditetapkan Keresidenan Jambi, Riau, Sumatera Barat dimasukan dalam sub Provinsi Sumatera Tengah (Junaidi T Noor. 2015:29).

Setelah utusan KNI Keresidenan Jambi kembali dari sidang KNI Sumatera di Bukit Tinggi, maka diadakan sidang lengkap KNI Keresidenan Jambi dari tanggal 28 sampai 31 Mei 1946 di Kota Jambi. Tujuan sidang adalah untuk melaksanakan maklumat Gubernur Sumatera No. 8/MGS yang isinya menyatakan bahwa KNI daerah harus menjadi badan dengan nama Dewan Perwakilan Daerah. Sebagai hasil sidang KNI Keresidenan Jambi tersebut adalah keputusan membentuk Daerah Perwakilan Keresidenan Jambi dengan anggota berjumlah 25 orang yang merupakan wakil dari setiap KNI Keresidenan orang yang terdiri dari 8 orang diangkat langsung oleh Residen yaitu Raden Inu Kertopati dan 17 orang melalui pemilihan, dipilih para utusan tersebut adalah :

Tabel 4. Wakil dari setiap KNI

Keresidenan Jambi		
No	Nama	Asal Daerah

1	Dr.Syahrial Rahman	Muara Tebo
2	Ibrahim	Muara Tebo
3	H.Muhamad	Muara Bungo
4	H. Hanapi	Muara Bungo
5	Abihasan	Bangko
6	M.Saidi	Bangko
7	A.Majid Umar	Muara Tembesi
8	A.Majid Batu	Muara Tembesi
9	SyamsuBahrnun	Sarolangun
10	A.Syurbani	Sarolangun
11	Jangcik	Kota Jambi
12	A.Malik Sulaiman	Kota Jambi
13	Rd. Sudarsono	Tanah Minyak/Kenali Asam
14	Rd. Mansur	Tanah Minyak
15	Ny. HabsahArbain	Kota Jambi
16	A.Chatab	Kota Jambi
17	KiJakfarA.Jalil	Seberang Kota Jambi
18	Jusuf Helmi	Seberang Kota Jambi
19	F.Silaeni	Kota Jambi
20	H.Ali Hamzah	Kota Jambi
21	Rd.Hamzah	Kota Jambi
22	Salim	Kuala Tungkal
23	Muhamad	Kuala Tungkal
24	St. Mulya	Muara Sabak
25	Ibrahim Singgau	Bangko

Pada musyawarah ini terpilih sebagai anggota Badan Pekerja adalah (Helfisa. 2021):

Ketua : Rd. Inu Kertopati
Ketua muda : Syamsu Bahrnun
Anggota : H.Ali Hamzah, Jangcik, Abd. Khatab, Dr. Sagaf Yahya

Pekerjaan pertama dari Badan ini adalah melaksanakan program (Dewan Harian Angkatan 45. 1990) :

1. Menyusun dan menetapkan struktur Pemerintahan daerah Jambi, misalnya pembagian Kabupaten, Kawedanan, dan Kecamatan.
2. Menetapkan seorang kepala perusahaan Minyak Republik Indonesia untuk Jambi, yaitu Rd.Sudarsono (ketua buruh minyak)
3. Menetapkan pengurus Fonds Kemerdekaan Indonesia (FKI) untuk Jambi,yaitu Rd.Utoyo dan M. Amin Aini.

Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia khususnya daerah Jambi, Syamsu Bahrnun bergerak dalam bidang perpolitikan. Syamsu Bahrnun sebagai ketua muda DPR Kresidenan yang ikut andil dalam membentuk daerah Jambi agar menjadi lebih maju dengan dibentuknya suatu struktur pemerintahan. Pada awal kemerdekaan tersebut belum adanya DPR Kresidenan hal itula yang melatar belakangi terbentuknya DPR Kresidenan Jambi. Dibentuknya DPR Kresidenan diberontakan agar pemerintahan yang baik dan kuat demi untuk melawan serangan Belanda dari serangan politik. Apabila kekuasaan politik berada pada pihak Indonesia membuat para pejuang kemerdekaan dengan mudah mengatur apa-apa saja yang dibutuhkan dalam mempertahankan kemerdekaan.

Selanjutnya Badan Eksekutif Keresidenan Jambi yang ada disempurnakan dan 6 orang personil dipilih dari Dewan Perwakilan Residen dengan ketua Raden Inu Kertopati, ketua muda Syamsu Bahrnun dan anggota; Abd. Khatab, Jangcik, H.Ali Hamzah, A. Syrbani

dan Rd. Hamzah. Badan eksekutif Keresidenan Jambi yang disempurnakan memulai tugasnya dengan:

1. Menyusun aparatur pemerintah sampai ke bawah (pamong praja dan dinas).
2. Menetapkan tambang minyak dengan nama "PERMIRI" (Perusahaan Minyak Republik Indonesia) dengan pimpinan R. Soerdasono.
3. Menetapkan pimpinan dan mengelolah fond kemerdekaan Indonesia (FKI). R.M. Utoyo dan M. Amin Aini sumber dana FKI dipungut dari cukai karet yang diekspor ke Singapura sebesar 10 % baik dari harga karet maupun harga barang yang dibeli. Hasil FKI ini diperuntukan bagi perjalanan pemerintah, aparatur dan perlengkapan tentara (pakaian, senjata, dan lain-lain)
4. Membentuk dewan pertahanan daerah Keresidenan Jambi pada tanggal 17 Juni 1946 dengan komposisi sebagai berikut, Ketua Residen Rd. Inu Kertapati, Wakil Lekol Teuku Mohd. Insyah, dan Anggota Rd. Hamzah, R. Sudarsono (organisasi buruh minyak), RH. Utoyo (Napindo), Dr. Purwadi (Pesindo), dan H. Ali Hamzah (Dewan Harian Angkatan 45. 1990).

Pada bulan Juni 1946, Residen Jambi menerima laporan sebuah kapal perang Belanda jenis Korvet memasuki wilayah perairan RI diantara Kuala Sungai Batanghari dengan Muara Sungai Pengabuan dan mengadakan provokasi dengan menjegat dan menahan kapal motor dan perah yang lewat serta menahan

beberapa orang diantara penumpangnya.

Resident Rd. Inu Kertapati memerintahkan Ketua Muda Badan Pekerja Harian Keresidenan Jambi Syamsu Bahrun dan RH. Sutopo Anggota Dewan Pertahanan Daerah disertai beberapa para aparat sipil dan militer melakukan penelitian tentang laporan itu. Di Kampung Laut rombongan Syamsu Bahrun menerima laporan dari beberapa anggota TRI pengawal partai dan Kepala Kampung bahwa kapal perang Belanda itu sudah tidak ada lagi disana. Kapal itu hanya seminggu berlabuh di Kuala dan rakyat yang ditangkap sudah dilepaskan (Bahrun. 1983).

Pada tahun 1947 pimpinan pemerintah Keresidenan Jambi diadakan perubahan pada badan pekerja DPR keresidenan, yang menggantikan Syamsu Bahrun sebagai ketua muda, dengan susunan Badan Pekerja DPR Keresidenan yaitu:

Ketua	: Raden Inu Kertapati
Ketua Muda	: A. Syarnubi
Anggota	: R. Ramzah, Salim, F. Silaen, Calik Sulaiman.

Syamsu Bahrun diangkat menjadi Wedana Sarolangun pada tanggal 30 April 1947 dengan gaji Rp.300.000. Wedana adalah pembantu pimpinan wilayah tingkat II (Kabupaten), membawahkan beberapa camat; atau merupakan pembantu bupati yang berkedudukan lebih tinggi dari camat. Diangkatnya Syamsu Bahrun menjadi wedana Sarolangun memberikan upaya langsung kepada masyarakat, menggerakkan badan perjuangan yang ada di daerah Sarolangun apabila

terdengar kabar bahwa Belanda ingin menyerang. Perjuangan di Sarolangun dilaporkan kepada Residen Jambi, dan apabila ada kekurangan dalam senjata dan bahan makanan dilaporkan kepada pimpinan.

Pengangkatan Syamsu Bahrin sebagai Wedana Sarolangun mendapat surat keputusan dari Daftar Ketetapan Gubernur Sumatera Negara Republik Indonesia tanggal 2 April 1947 No. 257 dengan isi :

“mengangkat yang tersebut pada daftar yang terlampir pada ketetapan ini dalam jabatan sebagai tersebut dibelakang namanya pada kolom 6 dengan gaji sebagai tertulis pada kolom 6 serta bantuan-bantuan yang lain yang sah berhubungan dengan jabatan. Segala sesuatu diperbuat dengan perjanjian bentuk merobah dan memperhitungkan mana-mana yang salah pada waktu penetapan“

Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan aksi militernya yang pertama, menyerang Republik Indonesia dan melanggar perjanjian Linggarjati yang dicapai dengan perantaraan dan bantuan Lord Killearn dari Inggris, yang ditandatangani pada 25 Maret 1947. Maka dari itu Residen Jambi Raden Inu Kertapati meyakini bahwa Belanda akan menyerang keresidenan Jambi, dengan demikian Keresidenan Jambi memberikan bantuan kepada setiap daerah kewedanan sebagai antisipasi serangan pihak Belanda ke Keresidenan Jambi.

Raden Inu Kertapati mengambil kebijakan memberi uang sebesar Rp.300.000 kepada setiap wedana di Jambi guna persiapan

perang dengan Belanda. Uang diserahkan pada wedana dalam keadaan terbungkus rapi terapat dengan lak. Uang boleh digunakan apabila pemerintahan kewedanan mengungsi keluar kota karena diserang Belanda. Pada tahun ini juga wakil presidenan M. Hatta berkunjung ke Jambi, dan sekaligus penyerahan simbol kesultanan ke pemerintahan Republik Indonesia. Dengan ini menyatakan Keresidenan Djambi resmi di bawah pemerintahan Republik Indonesia (Lindayanti. 2014)

Pada tanggal 27 November 1947 datang suatu rombongan dan menyerahkan surat yang berisi keputusan diberhentikan sementara dari jabatan Wedana Sarolangun. Keputusan itu dikirim dari Residenan Jambi pada tanggal 14 November 1947 Nomor 479 dengan isi :

“Memutuskan sementara menanti pengesahan paduka tuan Gubernur Sumatera: terhitung mulai tanggal 14 November 1947 memberhentikan buat sementara (dischorst) dari jabatan SyamsuBahrin Wedana Sarolangun. Memberikan kepada SyamsuBahrin tersebut diatas selama ia diberhentikan untuk sementara terhitung mulai tanggal 1 Desember 1947 uang bantan 30 % dari gaji sekarag”.

Pemberian surat pemberhentian tersebut membuat Syamsu Bahrin bingung. Amplop yang diberikan oleh residen Jambi sebesar Rp.300.000 belum digunakan sama sekali, bungkusnya pun masih terbungkus dengan rapi. Tetapi pada kejadian itu, mendengarkan kabar bahwa Syamsu Bahrin difitnah oleh seseorang yang menuduhnya telah

menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi.

Pada tahun 1948 dengan Undang-Undang No.10 tanggal 15 April 1948 yang menetapkan Sumatera menjadi 3 Provinsi dan Jambi masuk ke dalam Provinsi Sumatera Tengah. Saat itu Kresidenan Jambi terdiri dari 2 Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Jambi ulu (Barat) yang berkedudukan di Muara Tebo, Bupatinya adalah Bachan selanjutnya menjadi Residen Jambi.
2. Kabupaten Jambi ilir (Timur) yang berkedudukan di Jambi, Bupatinya adalah M.Kamil, pada clash II beliau mundur ke Bangko (Usman Meng. 2006:38).

Pada pertengahan Desember 1948 Syamsu Bahrun, dr.Purwadi, A.Calik Sulaiman diundang menghadiri sidang DPR Sumatera Tengah di Bukittinggi dengan menggunakan 2 kendaraan mobil jeep.

Pada tanggal 19 April 1948, Gubernur Sumatera mengesahkan ketetapan Residen Republik Indonesia Jambi tentang Skorsing yang diberikan kepada Syamsu Bahrun (Arsip; Daftar Riwayat pekerjaan dari Syamsu Bahrun anggota Staf Gubernur Provinsi Djambi, di Djambi). Setelah surat pengesahan itu diterima Syamsu Bahrun tidak lagi menjabat sebagai Wedana Sarolangun.

Pada tanggal 28 Desember 1948 Keresidenan Djambi diserang oleh pasukan Belanda. Pada serangan kali ini Teritorial Djambi (STD) melakukan perlawanan balik terhadap serangan Belanda di bawah pimpinan Letnam Kolenal Abundjani. Sub Teritorial Djambi

(STD) membawahi tiga batalion dan satu pasukan AURI yaitu:

1. Batalion Sarolangun dengan pimpinan Mayor Harun Sohar
2. Batalion Tanah Minyak dipimpin oleh Kapten Selamat
3. Batalion Jambi dipimpin oleh Kapten Marzuki kemudian di ganti dengan kapten Zainal Rivai
4. Pasukan AURI dengan pimpinan Kapten Udara Suyono dan Letnam Udara Maki Perdanan Kusuma.

Sejak 1 Desember 1948 Residen Jambi secara resmi diperbantukan pada Gubernur Sumatera Tengah. Di Kota Jambi mendapat serangan penuh dari Belanda pada tanggal 29 Desember 1948 sehingga Residen dan staf mengungsi ke dusun Rantaumajo. Tindakan Belanda mendapat perlawanan di seluruh daerah Jambi. Dalam suasana darurat itu Raden Inu Kertapati membuat surat kuasa kepada Bupati Jambi Iilir, M. Kamil. Komisaris Polisi Nuskam dan Ketua muda DPR A.Syurbani untuk menjalankan pemerintahan daerah Jambi yang berkedudukan di daerah yang dikuasai Belanda (Usman Meng. 2006:12). Pertempuran terjadi di empat titik, yaitu di lapangan terbang Paal Merah (Bandara Sultan Thaha), Kenali Asam, Tempino dan Bajubang. Tujuan Belanda menyerang daerah-daerah di Jambi adalah untuk mengurung Kota Jambi dan merebut pusat kota (Yasin. 2020).

Pada bulan Mei 1949, tentara Belanda menduduki daerah Sarolangun dan Bangko. Pada bulan Agustus 1949 tentara Belanda membawa beberapa pemuka rakyat setempat yaitu Syamsu Bahrun,

M.Saman, dan Jakariah Kasim secara paksa dikawal oleh tentara Belanda menggunakan motor boat ke Muara Tembesi, selanjutnya dibawa menggunakan mobil jeep untuk dibawa ke Jambi dan dipaksa menjadi anggota DDS yaitu Dewan Djambi Sementara (Bahrn. 1983). Pada 14 Agustus 1949 sidang pertama dilakukan oleh anggota DDS diberikan:

Petikan dari daftar ketetapan wakil tinggi mahkota di Indonesia tanggal 31 Maret 1949 No.8 (tentang pengesahan wakil-wakil rakyat Jambi yang dipilih tanggal 4 Maret 1949 sebagai rakyat Jambi dalam Dewan Djambi Sementara) dengan isi:

“Menetapkan wakil-wakil rakyat Jambi, yang dipilih pada tanggal 4 Maret 1949, oleh sebagian dari rakyat Jambi yang dapat mengeluarkan suaranya setara Demokrasi, diakui sebagai perwakilan sementara dari rakyat tersebut, dengan nama Dewan Djambi Sementara. Menentukan bahwa kewajiban dari Dewan Djambi Sementara ialah untuk memberikan nasehat (advies) kepada pembesar-pembesar yang bersangkutan dalam hal-hal yang mengenai pemerintahan Djambi. Menentukan bahwa teristimewa yang menjadi kewajiban dari Dewan Djambi Sementara ialah : mengemukakan kehendak-kehendak dari rakyat Jambi dalam menjalankan pemerintahan Negara Republik Indonesia Serikat yang berdaulat dan tentang perhubungan antara Negara Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Menentukan bahwa oleh Dewan Djambi Sementara akan

ditetapkan suatu peraturan ketertiban, dalam mana juga dimasukkan peraturan-peraturan tentang bagaimana cara-caranya “nasehat” (advies) Dewan akan dikemukakan.

Resolusi Dewan Djambi Sementara dalam sidang lengkap pada tanggal 11 Juli 1949 dengan isi: Memaklumi pengumuman komisi perserikatan bangsa-bangsa untuk Indonesia No.43 istimewa tentang bagian yang mengenai pihak-pihak yang turut serta dalam konperesi meja bundar, yaitu Wakil-wakil pemerintah kerajaan Belanda, Wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia, BFO sebagai wakil daerah-daerah di Indonesia di lar Republik, yang termasuk anggota dari pada organisasi itu.“ (Petikan dari daftar Ketetapan Wakil Tinggi Mahkota di Indonesia pada 31 maret 1949 No.8).

Pada tanggal 16 Agustus 1949, Syamsu Bahrn diminta oleh rekannya untuk meminta izin kepada TBA agar besok, tanggal 17 Agustus 1949 dapat diizinkan mengibarkan bendera merah putih, tetapi pihak Belanda tidak mengizinkan. Pihak Belanda mengecam, barang siapa yang mengibarkan bendera merah putih akan ditangkap. Pada bulan September 1949, Van Schendel memanggil Syamsu Bahrn, Ks. Ag. Dung, Jancik. Pada saat itu ada wartawan dari Amerika mewancarai, dengan bertanya mengenai sengketa antara Indonesia dengan Belanda. Kemudian para pemuka rakyat itu menjawab dengan jawaban yang sama yaitu agar Amerika membantu supaya perundingan antara Belanda dan Indonesia di Konferensi Meja Bundar nanti dapat selesai dengan baik dengan menyerahkan kedalatan

kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Van Schendel mebicarakan supaya tentara federal buatan Belanda diakui sebagai tentara daerah Jambi, selanjutnya Van Schendel memajukan pada badan harian DDS, agar di Jambi diadakan pemilihan umum untuk menentukan apakah rakyat Jambi menyetujui agar daerah Jambi menjadi daerah Istimewa. Selanjutnya oleh Van Schendel memberikan surat pernyataan yang berisi menyatakan bahwa rakyat Jambi menolak kekuasaan Republik Indonesia masuk ke daerah Jambi sebelum daerah Jambi menjadi daerah Istimewa, tetapi semua yang dibicarakan oleh Van Schendel tidak disetujui oleh Syamsu Bahrun, Ks. Ag. Dung, dan Jangcik. Pada tanggal 25 Desember 1949, di daerah Jambi adanya Pemerintah Republik Indonesia yang akan menerima penyerahan dari Belanda.

Persoalan yang terjadi antara Syamsu Bahrun dengan pihak Belanda selama menjadi anggota DDS dilaporkan kepada Baehsan dan A. Sjarbuni (Bahrun, 1983). Selanjutnya kepada Syamsu Bahrun oleh A. Sjarbuni diberikan surat keputusan dari Dewan Pertahanan daerah Jambi yang memutuskan menjabat kembali menjadi Wedana Sarolangun pada tanggal 15 April 1949 No.10/DPD yang berisi :

“Memutuskan menjabat kembali segala ketetapan yang berhubungan dengan penggantungan pangkat terhadap Syamsu Bahrun sebagai Wedana Sarolangun terhitung mulai tanggal 30 April 1949 diganti kembali segala kerugian sebagai

akibat dari penggantungan pangkat”

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari apa yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pada penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran Syamsu Bahrun dalam mempertahankan kemerdekaan. Faktornya yaitu dari segi ekonomi, budaya, pendidikan, dan lingkungan tempat tinggal. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi kepribadian Syamsu Bahrun dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan cara berfikirnya. Terlebih lagi pada zaman tersebut adalah zaman penjajahan, yang sangat berpengaruh pada kepribadian seseorang untuk menjadikan bangsa ini, bangsa yang merdeka. Kedua, pada penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana peran Syamsu Bahrun dalam mempertahankan kemerdekaan. Peran Syamsu Bahrun dalam mempertahankan kemerdekaan dengan cara ikut bergabung dalam organisasi perjuangan serta ikut dalam perpolitikan daerah Jambi untuk membangun daerah Jambi menjadi lebih baik.

Perannya yaitu menjadi ketua KNI Sarolangun yang bertugas mengorganisasikan perjuangan serta menampung dan mengurus bekas orang kerja paksaan Jepang. Syamsu Bahrun dipilih menjadi ketua muda dari badan pekerja dewan perwakilan kresidenan Jambi yang berperan dalam membangun daerah Jambi. Selain bertugas dalam membangun daerah Jambi, Syamsu Bahrun

bertugas dalam menjaga keamanan daerah Jambi dari Belanda yang ingin menguasai daerah Jambi kembali. Peranan Syamsu Bahrun juga terdapat pada saat Syamsu Bahrun dipaksa oleh pihak Belanda untuk menjadi anggota DDS yaitu dengan tidak menyetujui siasat-siasat yang diberikan oleh Belanda berbentuk surat dan menyuruh Syamsu Bahrun untuk menandatangani surat tersebut, tetapi syamsu bahrun menolak.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

Daftar Riwayat Pekerjaan dari
Sjamsue Bahrun Anggota Staf
Gubernur Provinsi Djambi

Dewan pimpinan daerah LVRI
provinsi Jambi. 2014. *Sejarah
penyusunan pemerintah sipil
dan kekuatan bersenjata di
daerah keresidenan Jambi tahun
1945-1949*. Jambi: Dewan
Pimpinan Daerah LVRI Provinsi
Jambi.

Dewan Harian Derah Angkatan 45
Provinsi Jambi. 1990. *Sejarah
Perjuangan Kemerdekaan RI
(1945-1949) Di Provinsi Jambi*.
Jambi.

Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan. 1986. *Sejarah
Revolusi Kemerdekaan Daerah
Jambi*. Jakarta.

Ketetapan Dewan Pertahanan Daerah
Jambi tanggal 15 April 1949
No.10/DPD

Ketetapan Wakil Tinggi Mahkota di
Indonesia pada 31 maret 1949
No.8

Ketetapan Residen daerah Djambi
tanggal 21 November 1947 No.
479

Ketetapan Gubernur Sumatera Negara
Republik Indonesia di
Pematangalantar tanggal 2 April
1947 No.257

Residen Djambi yang dibuat tanggal
31 Januari 1931 tentang
penjualan garam di Muara Tebo

Residen Djambi pada tanggal 9
Agustus 1932 tentang dibebaskan
dari pengawasan penjalan garam
di Muara Tebo

Residen Djambi yang dibuat pada
tanggal 17 Februari 1934 tentang
surat pemberhentian jabatan
Syamsu Bahrun menjadi Asisten
Demang Tebo.

Residen Djambi yang dibuat pada
tanggal 30 Desember 1929
tentang hasil upah sebagai
Asisten Demang Pauh

Residen Djambi yang dibuat pada
tanggal 4 Desember 1930 tentang
surat pengangkatan jabatan
Syamsu Bahrun menjadi Asisten
Demang di Muara Tebo

Surat Keterangan menjabat menjadi
Pasirah Marga Simpang III
Sarolangun dari Residen Djambi
yang dimuat pada tanggal 21 Mei
1935.

Syamsu Bahrun. 1983. *Pengalaman
Perjuangan Menegakan
Kemerdekaan di Daerah Jambi
(1945-1949)*.

Buku:

Kartodirdjo. 1992. *Pendekatan Ilmu
Social dalam Metodologi
Sejarah*. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama

Kuntowijoyo. 2001. *Ilmu Sejarah*.
Yogyakarta: Bentang.

Lindayanti, Junaidi. T Noor, Ujang
Hariadi. 2014. *Menyibak Sejarah
Tanah Pusako*. Jambi: Badan
Perpustakaan Arsip dan
Dokumentasi Kota Jambi

- Meng, Usman meng. 2006. *Napak Tilas Provinsi Jambi*. Jambi: Pemerintah Provinsi Jambi.
- Meng, Usman. Tanpa Tahun. *Kumplan Tulisan Tentang Jambi*. Jambi: Kantor Arsip Daerah Provinsi Jambi.
- Noor, Junaidi T. 2015. *Relief sejarah dan perjuangan rakyat Jambi*. Jambi: Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.
- Priyadi, Sugeng. 2011. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Artikel:
Ibrahimsyah, Zafrano. Perkembangan dan pelaksanaan pendidikan zaman colonial Belanda di Indonesia abad 19-20. *Jurnal artefak*. Vol7 no.2. hlm 92
- Prayudi, dkk. Pendidikan pada masa Nirwan II Yasin dkk. Perjuangan Sub Komandement Sumatera Selatan Garuda Putih Teritorial Djambi dalam mempertahankan kemerdekaan di Kresidenan Djambi 1946-1949. *Jurnal Ilmu Humaniora*. Ilmu Sejarah Universitas Jambi. Vol.4 No.2 Desember 2020, Hlm 230.
- Nur Laely, Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di *Onderafdeling Bonthain* 1905-1942. *Jurnal*. Pendidikan IPS, Kekhususan Pendidikan Sejarah Program Pascasarjana. Universitas Negeri Makassar pemerintahan Kolonial Belanda di Surabaya tahun 1901-1942. *Jurnal*. Fakultas Sastra Universitas Jember. Vol 1.No 3. 2015.
- Susilo, Agus. 2018. Sejarah Perjuangan Jendral Soedirman dalam mempertahankan Indonesia”dalam *jurnal historia* volume 6 Lubuk Linggau: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Skripsi/Tesis/Disertasi:
Darwis, Tahir. 2017. Perjuangan Andi Depu dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia (1945-1950), *Skripsi*, Makasar: Universitas Islam Negeri Allaudin.
- Dendri Helfisa , Skripsi, “ Peran H.Sjamsoe Bahroen Dalam Sejarah Terbentuknya Provinsi Jambi “ (Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2021).
- Wawancara:
Wawancara Iskandar, Menantu Syamsu Bahrn: 2 Agustus 2021.
Wawancara Hamidsyam, Anak Syamsu Bahrn: 1 September dan 22 Oktober 2021.
Wawancara Emiyatim, Keponakan Syamsu Bahrn: 15 Oktober 2021.
Wawancara Mariana Syam, anak Syamsu Bahrn: 2 Agustus 2021.
Wawancara Elimawati, tetangga Syamsu Bahrn: 3 September 2021.
Wawancara Abdul Hamid Syam, Anak Syamsu Bahrn: 22 Oktober 2021.